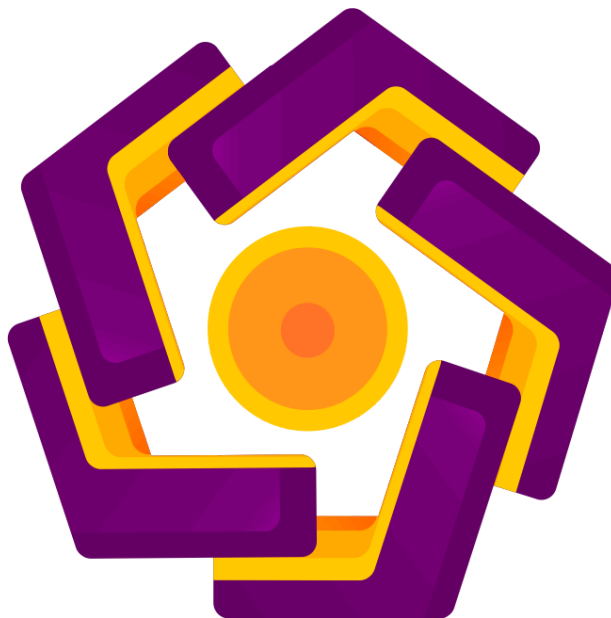


UJIAN AKHIR SEMESTER

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

“Pengaruh Wawasan Nusantara dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Ketahanan Nasional di Indonesia”

Dosen Pengampu : Wiji Nurastuti, S.E., M.T.



Disusun oleh :

Brian Bintang Chahya

(21.11.4195)

S1 INFORMATIKA

2023/2024

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Ring Road Utara, Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia

Pengaruh Wawasan Nusantara dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Ketahanan Nasional di Indonesia

Abstrak

Ketahanan nasional menjadi isu krusial bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengingat posisi strategisnya sebagai kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya. Dalam rangka mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan dan kesejahteraan rakyat, pengaruh wawasan nusantara dan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh wawasan nusantara dan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap ketahanan nasional di Indonesia, serta mengidentifikasi dinamika dan tantangannya.

Gambaran kondisi saat ini mengungkapkan bahwa NKRI menghadapi berbagai ancaman keamanan, krisis kesehatan, serta tantangan ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, ketahanan nasional menjadi sangat penting guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan negara. Wawasan nusantara, sebagai pandangan strategis mengenai wilayah kepulauan Indonesia, dapat memperkuat persatuan dan identitas nasional, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola sumber daya maritim secara berkelanjutan. Namun, implementasi wawasan nusantara dihadapkan pada tantangan koordinasi antarlembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Sementara itu, penegakan hukum yang berkeadilan menjadi faktor kunci dalam menciptakan ketertiban dan keamanan, mendorong investasi, serta menangani korupsi. Dengan adanya iklim hukum yang adil, masyarakat dapat merasa aman dan memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan. Namun, upaya penegakan hukum yang berkeadilan dihadapkan pada kendala korupsi di dalam sistem peradilan dan keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar lebih memahami dan mendukung penegakan hukum secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggali data dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk pidato, artikel jurnal, serta peraturan perundang-undangan terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselarasan antara wawasan nusantara dan penegakan hukum yang berkeadilan akan memberikan dampak positif bagi ketahanan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menerapkan wawasan nusantara secara konsisten dan memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan nasional di era globalisasi ini.

1. Gambaran Kondisi Saat Ini dan Alasan Diperlukannya Ketahanan Nasional bagi NKRI

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi eksistensinya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Indonesia, sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki beragam tantangan dan ancaman yang perlu dihadapi guna memastikan kelangsungan negara, kedaulatan, dan keutuhan wilayahnya. Beberapa kondisi saat ini yang mendorong pentingnya ketahanan nasional bagi NKRI antara lain:

a. Keragaman Geografis dan Sumber Daya Alam

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan beragam geografis, seperti pulau-pulau besar, kepulauan, gunung berapi, dan laut yang luas. Sumber daya alam yang melimpah juga menjadi daya tarik bagi negara-negara lain. Oleh karena itu, penting untuk melindungi sumber daya alam dan wilayah Indonesia dari ancaman yang dapat merusak kedaulatan dan keutuhan negara.

b. Potensi Konflik Etnis dan Sosial

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama. Hal ini dapat menjadi potensi konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ketahanan nasional harus memastikan harmoni sosial dan mengelola potensi konflik secara bijaksana.

c. Ancaman Terorisme dan Radikalisme

Terorisme dan radikalisme merupakan ancaman yang nyata bagi keamanan dan stabilitas negara. Ketahanan nasional harus mampu mengatasi dan mencegah aksi terorisme serta menyadarkan masyarakat tentang bahaya radikalisme.

d. Kerentanan terhadap Bencana Alam

Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik, membuatnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir. Ketahanan nasional harus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.

e. Ancaman Keamanan Maritim

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengamankan perairan dan sumber daya maritimnya dari perompakan, penyelundupan, dan pencurian.

f. Ancaman Keamanan

Indonesia berbatasan dengan banyak negara, dan kawasan Lautan Pasifik serta Hindia adalah jalur perdagangan dan navigasi utama dunia. Hal ini menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan senjata ilegal.

g. Krisis Kesehatan dan Lingkungan

Pandemi dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional, mempengaruhi kesehatan masyarakat, perekonomian, dan kelestarian lingkungan.

h. Keragaman Sosial dan Budaya

Indonesia memiliki ribuan pulau dengan beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Ketahanan

nasional harus mampu memperkuat persatuan dan kesatuan serta mengelola keragaman ini dengan bijaksana.

i. Kekayaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam seperti minyak, gas, pertambangan, dan keanekaragaman hayati yang melimpah menjadi daya tarik bagi negara-negara lain. Ketahanan nasional harus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya ini untuk kesejahteraan rakyat.

2. Pengaruh Wawasan Nusantara terhadap Ketahanan Nasional

Wawasan Nusantara adalah pandangan strategis yang mengedepankan kesatuan, persatuan, dan keselarasan bangsa Indonesia, dengan memanfaatkan dan menjaga keanekaragaman alam, budaya, dan sosial. Pengaruh Wawasan Nusantara terhadap ketahanan nasional mencakup beberapa aspek penting:

a. Integrasi Wilayah

Wawasan Nusantara mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Integrasi wilayah yang baik akan mengurangi disparitas antar daerah dan meningkatkan stabilitas politik serta sosial.

b. Maritim sebagai Identitas

Wawasan Nusantara memperkuat identitas maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan, kemampuan mengamankan dan memanfaatkan sumber daya laut sangat krusial untuk ketahanan nasional.

c. Penjagaan Kedaulatan

Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya menjaga dan mengamankan perbatasan serta pulau-pulau terluar Indonesia, untuk mencegah klaim wilayah oleh negara lain.

d. Kerukunan Antar Etnis dan Agama

Wawasan Nusantara mendorong sikap saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar etnis dan agama. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi konflik sosial.

e. Persatuan dan Identitas Nasional

Wawasan Nusantara dapat memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional karena mendorong kesadaran bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisahkan.

f. Ketahanan Maritim

Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pengelolaan dan pengamanan wilayah laut Indonesia. Keamanan maritim mempengaruhi kelancaran perdagangan, perekonomian, dan menjaga kedaulatan wilayah laut.

g. Diplomasi dan Hubungan Internasional

Melalui Wawasan Nusantara, Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam hubungan internasional, membangun kerjasama regional, dan menyelesaikan permasalahan dengan negara

tetangga secara damai.

Tantangan Wawasan Nusantara

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Wawasan Nusantara dan identitas maritim Indonesia.
- Mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah pulau-pulau besar dan wilayah terluar Indonesia.
- Menangani isu-isu keamanan maritim, seperti illegal fishing dan penyelundupan.
- Mencapai keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Wawasan Nusantara

- Koordinasi Antar Lembaga, Memastikan keselarasan dan koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait dalam implementasi Wawasan Nusantara.
- Sumber Daya dan Kapasitas, Memerlukan alokasi sumber daya dan peningkatan kapasitas untuk mengelola wilayah kepulauan yang luas dan kompleks.
- Kesadaran Masyarakat, Diperlukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Wawasan Nusantara dan peran setiap individu dalam menjaga ketahanan nasional.

3. Pengaruh Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Ketahanan Nasional

Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki peran sentral dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di negara. Pengaruh penegakan hukum yang berkeadilan terhadap ketahanan nasional meliputi:

a. Pencegahan dan Penindakan Kejahatan

Penegakan hukum yang efektif dapat mencegah dan menindak berbagai bentuk kejahatan, termasuk korupsi, terorisme, perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan lintas negara.

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum yang berkeadilan akan melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran hak-hak individu, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

c. Penguatan Sistem Hukum Nasional

Penegakan hukum yang berkeadilan akan memperkuat sistem hukum nasional dan memastikan kepatuhan terhadap hukum secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

d. Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

Penegakan hukum yang berkeadilan penting untuk memberantas korupsi, yang dapat melemahkan stabilitas politik dan perekonomian negara.

e. Ketertiban dan Keamanan

Penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan akan menciptakan ketertiban dan keamanan di

masyarakat, sehingga berbagai ancaman terhadap stabilitas negara dapat diredam.

f. Investasi dan Ekonomi

Iklim hukum yang adil dan jaminan hukum akan menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

- Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir.
- Penyediaan anggaran yang memadai untuk sistem peradilan dan penegakan hukum.
- Mengatasi praktik hukum yang diskriminatif atau tidak adil.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

Tantangan dalam Mengimplementasikan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

- Korupsi dan Keterbatasan Sumber Daya, Korupsi di dalam sistem peradilan dan keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran dapat menghambat penegakan hukum yang berkeadilan.
- Kesadaran Hukum Masyarakat, Beberapa lapisan masyarakat masih kurang memiliki kesadaran hukum, sehingga edukasi dan sosialisasi hukum perlu ditingkatkan.
- Reformasi Hukum, Diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang mungkin terjadi dalam penegakan hukum.

Kesimpulan

Pengaruh Wawasan Nusantara dan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap ketahanan nasional di Indonesia sangat penting dalam menghadapi beragam tantangan dan ancaman. Wawasan Nusantara akan memperkuat identitas dan integrasi bangsa Indonesia, sementara penegakan hukum yang berkeadilan akan menciptakan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan stabilitas politik. Menghadapi dinamika dan tantangan yang ada, peran aktif dari semua elemen masyarakat, pemerintah, dan institusi hukum menjadi krusial dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia.

Sumber Referensi

- Soekarno, I. (1962). Pembukaan Sidang Tahunan MPRS Ke-XXIII.
- Mahfud MD. (2003). Hukum dan Perubahan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, M. (2010). Wawasan Nusantara, Keadilan, dan Hukum Internasional. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Mustofa, A. (2017). Ketahanan Nasional Indonesia dalam Tantangan Global. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 20(3), 251-262.
- Djojohadikusumo, M. (2008). Hukum dan Perubahan Sosial. Makalah disajikan dalam Dies Natalis ke-53 Universitas Katolik Parahyangan.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2019). Memahami Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

- Wawasan Nusantara: Membangun Indonesia dari Pinggiran. (2018). Presiden Republik Indonesia.

